

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan sebagai substansi paling krusial dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan manusia yang cerdas sehingga dapat meningkatkan derajat sumber daya manusia dan dapat menciptakan kesejahteraan. Pendidikan juga dikatakan sebagai proses yang tidak akan pernah berakhir atau disebut juga *never ending process* (Sujana, 2019). Maka dari itu pendidikan sangat berperan penting dalam pembangunan manusia secara global. Pembangunan pendidikan yang baik akan mempengaruhi pembangunan nasional yang mampu menciptakan individu yang berdaya saing global. Dari proses pendidikan dapat menghasilkan kualitas yang mampu membentuk seorang manusia yang mempunyai nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa:

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia masih dianggap rendah. Ini terlihat dari hasil survei

PISA (*Programme for International Student Assessment*) 2018 yang diterbitkan pada tahun 2019, dimana Indonesia berada di peringkat ke-74 dari 79 negara lainnya dalam hal sistem pendidikan menengah. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing di era global dipersulit dengan lanskap pendidikan yang terus berkembang dan menjadi faktor kunci percepatan globalisasi (Sobri & Ningrum, 2015). Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk melakukan perubahan kurikulum guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan perubahan kurikuler. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin mengharuskan perubahan kurikulum diterapkan lebih dari sekali setiap lima tahun. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang ditempatkan secara sangat strategis ketika seluruh aspek upaya pendidikan dipertimbangkan. Mengingat peran sentral kurikulum dalam pengajaran, pengembangan kurikulum harus didasarkan pada struktur yang kokoh (Azis, 2018). Artinya kurikulum berfungsi sebagai peta jalan proses belajar mengajar.

Kurikulum Indonesia sendiri telah berkembang melalui revisi selama beberapa waktu sekarang. Kebijakan Kurikulum 2004, Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK), menetapkan tiga ciri kurikulum ini. Pertama, KBK menetapkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Kedua, penekanan KBK pada proses pembelajaran berdasarkan pengalaman mempertimbangkan keunikan setiap peserta didik, dan ketiga, penilaian KBK mengutamakan penilaian hasil dan metode pengajaran (Elisa, 2021). Setelah itu

diperkenalkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun ajaran 2007/2008. Program Studi di KTSP. Berikut beberapa ciri khas KTSP: 1) Kurikulum yang didedikasikan untuk kajian bidang keilmuan yang 2) berpusat pada siswa, 3) fleksibel, dan 4) berbasis teknologi, dengan mempertimbangkan potensi, perkembangan, kebutuhan siswa dan dunia, dan minat. Selain itu, Kurikulum 2013 telah diterapkan sepenuhnya di sekolah-sekolah nasional pada tahun 2014. Berikut beberapa ciri Kurikulum 2013 (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Kompetensi Inti sebagai unsur organisasi meliputi 1) baik pengembangan kompetensi secara menyeluruh, 2) kontekstualisasi dalam lingkungan sekolah, 3) kemampuan beradaptasi berdasarkan waktu, 4) kedalaman kompetensi, dan 5) kompetensi inti. Kurikulum K13 dibangun berdasarkan karakteristik pendidikan K12 dan dimaksudkan untuk membekali siswa dengan keterampilan yang mereka perlukan untuk menghadapi tantangan dunia global. Keterampilan komunikasi yang baik, memiliki sikap moral yang positif, kemampuan berpikir kritis, kesiapan berperan sebagai warga negara yang baik, kemampuan beradaptasi dalam masyarakat global, penerimaan terhadap perbedaan pandangan, etos kerja, pengembangan potensi sesuai dengan bakat individu, kesadaran lingkungan, dan minat hidup secara umum merupakan beberapa kompetensi yang menjadi fokus dalam menjawab tantangan global tersebut. (Fussalam & Elmiati, 2018).

Karena kemajuan teknologi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, maka pemerintah mengeluarkan dan menerapkan kebijakan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka, karena hadirnya Kurikulum 2013 masih belum

menjawab tantangan dalam dunia pendidikan. Setelah hasil PISA menunjukkan bahwa sekitar 70% anak usia 15 tahun di Indonesia memiliki kinerja di bawah standar minimum dalam pemahaman membaca dan penerapan konsep dasar matematika, Kurikulum Merdeka diterapkan. Tidak ada kemajuan berarti dalam kinerja PISA selama dekade terakhir. Pandemi COVID-19 telah memperburuk kesenjangan dalam kesempatan pendidikan lintas batas geografis dan sosial ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2023).

Ciri-ciri utama Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk membantu pemulihan kemajuan akademik adalah sebagai berikut: Pertama, profil siswa Pancasila digunakan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan penekanan pada pengembangan karakter dan soft skill. (2) Lebih menekankan pada mata pelajaran dasar sehingga siswa dapat memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan matematika pada tingkat yang lebih dalam (Barlian et al., 2022).

Tidak ada perubahan kurikulum yang diamanatkan pemerintah menghilangkan penekanan pada pengembangan karakter kewarganegaraan siswa. Nilai dan etika dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia. Hal ini mencerminkan sifat bangsa Indonesia Menurut Mulyono (2017) kewajiban moral warga negara, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap harga diri setiap individu, semuanya merupakan bagian dari disposisi kewarganegaraan mereka. Kepedulian terhadap sesama warga negara, perilaku santun, kepatuhan terhadap hukum, kemampuan berpikir kritis, dan kemauan berdialog serta berkompromi merupakan aspek-aspek karakter publik seseorang.

Pesan yang dapat diambil adalah bahwa kualitas sipil yang baik sangat penting untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk individu yang bermoral dan masyarakat yang bermoral. Menurut Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diamanatkan tidak hanya pada tingkat dasar dan menengah tetapi juga pada tingkat perguruan tinggi.

Menurut aturan ini, kelas PKn sangat penting untuk pengembangan warga negara yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Pangalila (2017) Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk generasi muda menjadi warga negara yang bertanggung jawab, patriotik, dan penuh kasih sayang yang menghargai dan menghormati kekayaan keragaman budaya Indonesia. Tingkat kejahatan di kalangan pelajar akan meningkat seiring dengan berkembangnya pandangan dunia yang egois dan fundamentalis akibat menurunnya karakter sipil (*civic disposition*). Pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai persyaratan beban mata pelajaran di sekolah umum. Ketika pemerintah menerapkan persyaratan baru untuk kurikulum, mata pelajaran yang membentuk pendidikan kewarganegaraan terus diganti namanya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah nama resmi yang diberikan pada mata pelajaran ini dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Topik tersebut berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) setelah kurikulum KTSP diperkenalkan, dan kurikulum 2013 selanjutnya diterapkan oleh pemerintah. Sejak diperkenalkan ke dalam kurikulum KBK, mata kuliah PKn mengalami rebranding kembali ke nama semula yaitu PPKn. Pendidikan

sebagai proses pencerahan kehidupan bangsa yang diperkuat dengan penguatan empat pilar kebangsaan menjadi tujuan diperkenalkannya kembali nama PPKn ke dalam kurikulum K-13 (Reza, 2021). Kurikulum Merdeka telah diperbarui untuk mencerminkan rebranding unit PPKn menjadi Pendidikan Pancasila. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 yang mengubah Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelajaran agama, pelajaran Pancasila, dan pelajaran bahasa Indonesia semuanya terdaftar sebagai mata pelajaran wajib dalam Pasal 40. Anindito Aditomo, Kepala Badan Pengkajian dan Standar Kurikulum Pendidikan (BSKAP) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan rebranding ini akan menyoroti Peran Pancasila sebagai falsafah penuntun bangsa.

Harapan pemerintah adalah untuk menumbuhkan dalam diri warga negaranya seperangkat nilai dan moral berdasarkan Pancasila, sehingga istilah “Pendidikan Pancasila” digunakan untuk menyebut mata kuliah yang termasuk dalam Kurikulum Merdeka. Melalui Proyek Penguatan Profil Siswa Pancasila, Kurikulum Merdeka juga berupaya untuk menumbuhkan keterampilan sosial (*soft skill*) dan karakter sekaligus membentuk watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan utama pembuatan dan penerapan Kurikulum Merdeka adalah untuk memungkinkan siswa menemukan dan mengembangkan bakat mereka dengan cara yang paling relevan bagi mereka, sekaligus meletakkan dasar yang kuat tentang karakter kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum Profil pelajar Pancasila.

Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 5 Karawang, SMA Negeri 5 Karawang telah menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kurikulum merdeka diterbitkan oleh pemerintah sebagai upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemic Covid-19. Kurikulum merdeka lebih mengedepankan pembentukan siswa yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Hal inilah yang menjadi alasan SMA Negeri 5 Karawang untuk menerapkan kurikulum merdeka, karena fakta dilapangan banyak dijumpai perilaku siswa yang cenderung mencerminkan menurunnya kualitas *civic disposition* hal ini ditandai dengan perilaku tidak sopan terhadap guru, teman dan masyarakat. Terlebih lagi sekarang ini pada masa pemulihan pandemic Covid-19 turunya *civic disposition* sangat pesat, para peserta didik menjadi kurang peduli terhadap sesama lebih asyik menyendiri. Hal ini tentunya mempengaruhi peningkatan *civic disposition* sehingga sudah saatnya warga Indonesia mengatasi krisis watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

Perkembangan zaman yang semakin pesat akan mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia, salah satu tempat terjadinya proses pembentukan karakter yaitu sekolah. Melalui penerapan kurikulum yang sesuai menjadi acuan bagi sekolah untuk membentuk *civic disposition* peserta didik. Kurikulum merdeka dirancang untuk menjawab tantangan di zaman sekarang ini. Berdasarkan latar belakang diatas, dengan begitu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Terhadap Peningkatan Civic Disposition Siswa Di SMA Negeri 5 Karawang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Munculnya teknologi-teknologi baru yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik.
2. Kurangnya kesadaran dan jiwa nasionalisme para peserta didik.
3. Masuknya budaya luar yang dapat mempengaruhi jiwa nasionalisme peserta didik.

C. Batasan Masalah

Peneliti telah mempersempit ruang lingkup studi berdasarkan faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi masalah. Maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dengan menentukan ruang lingkup masalah penelitian pada variable yang dapat mempengaruhi yaitu pembelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka terhadap variable yang dapat dipengaruhi yaitu peningkatan *civic disposition* siswa, serta seberapa besar pengaruh tersebut. Sehingga batasan masalah dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah “Pengaruh Pembelajaran Pancasila dalam Kurikulum Merdeka Terhadap Peningkatan *Civic Disposition* Siswa”

D. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini peneliti merumuskan masalah yang dapat diuraikan dalam pertanyaan berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pembelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka terhadap peningkatan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 5 Karawang?

2. Seberapa besar tingkat pengaruh pembelajaran pendidikan pancasila dalam kurikulum merdeka terhadap peningkatan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 5 Karawang?

E. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mencapai keberhasilan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka terhadap peningkatan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 5 Karawang.
2. Untuk mengetahui Seberapa besar tingkat pengaruh pembelajaran pancasila dalam kurikulum merdeka terhadap peningkatan *civic disposition* siswa di SMA Negeri 5 Karawang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan pengetahuan penerapan pembelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka disekolah yang mengkaji tentang pengaruh pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka terhadap peningkatan *civic disposition* siswa SMAN 5 Karawang.

2. Manfaat Praktis

Berikut adalah empat keuntungan nyata dari penelitian ini:

- a. Bagi Sekolah

Untuk mengukur seberapa baik kurikulum merdeka diterapkan di sekolah.

b. Bagi Guru

Sebagai sarana evaluasi guru khususnya guru Pendidikan Pancasila dalam melaksanakan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum merdeka.

c. Bagi Siswa

- 1) Sebagai sarana untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*).
- 2) Untuk meningkatkan kecerdasan yang telah dimiliki agar lebih aktif dan maju dalam melaksanakan peran sebagai warga negara yang baik.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan pembaharuan untuk terus mengikuti perkembangan zaman dalam dunia pendidikan agar dapat membantu proses perkembangan pendidikan itu sendiri khususnya membantu dalam pengembangan *civic disposition* siswa.